



**RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025-2029**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025**

**Kompleks Bangsal Sewokoprojo Wonosari,
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812
Email : kesbangpol@gunungkidulkab.go.id**



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

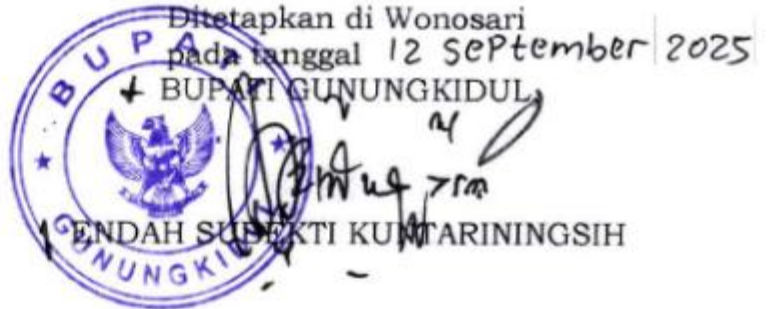
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.



Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR	TABEL	i
DAFTAR	TABEL	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar belakang	2
1.2	Landasan Hukum	4
1.3	Maksud dan Tujuan.....	4
1.4	Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	6
2.1	Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	6
2.2	Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	7
2.3	Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11
2.4	Kelompok Sasaran Layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	22
2.5	Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	22
2.5.1	Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22
2.5.2	Penentuan Isu Strategis	23
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	26
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	26
3.2	Strategi dan kebijakan Perangkat Daerah	30
3.3	Telaahan Renstra Kementrian /Lembaga Dan Renstra Provinsi.....	38
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	39
4.1	Uraian Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	39
4.2	Uraian Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	40
4.3	Uraian beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	40
BAB V	PENUTUP	91

DAFTAR TABEL

Halaman		
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa menurut jenis kelamin.....	8
Tabel 2.2	Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menurut Usia	8
Tabel 2.3	Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menurut Golongan	9
Tabel 2.4	Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menurut Pendidikan	9
Tabel 2.5	Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Diklat kepemimpinan	10
Tabel 2.6	Daftar Asset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026.....	14
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026	14
Tabel 2.9	Isu Strategis Perangkat Daerah.....	24
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	28
Tabel 3.2	Pentahapan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	29
Tabel 3.3	Analisis Faktor-faktor Internal dan Eksternal.....	30
Tabel 3.4	Analisis USG Faktor Internal dan Eksternal	31
Tabel 3.5	Pentahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	32
Tabel 3.6	Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ..	33
Tabel 3.7	Pentahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	34
Tabel 3.8	Identifikasi Permasalahan, Faktor Penghambat, dan Pendorong Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	35
Tabel 3.9	Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah.....	36
Tabel 3.10	Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah.....	38
Tabel 4.1	Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul.....	42
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul.....	55
Tabel 4.3	Subkegiatan prioritas dalam mendukung prioritas pembangunan daerah.....	86
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	90

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025-2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan berkembangnya dinamika kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat maka sistem pemerintahan mengalami perubahan yang mengharuskan pemerintah mewujudkan pemerintahan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dituntut untuk menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

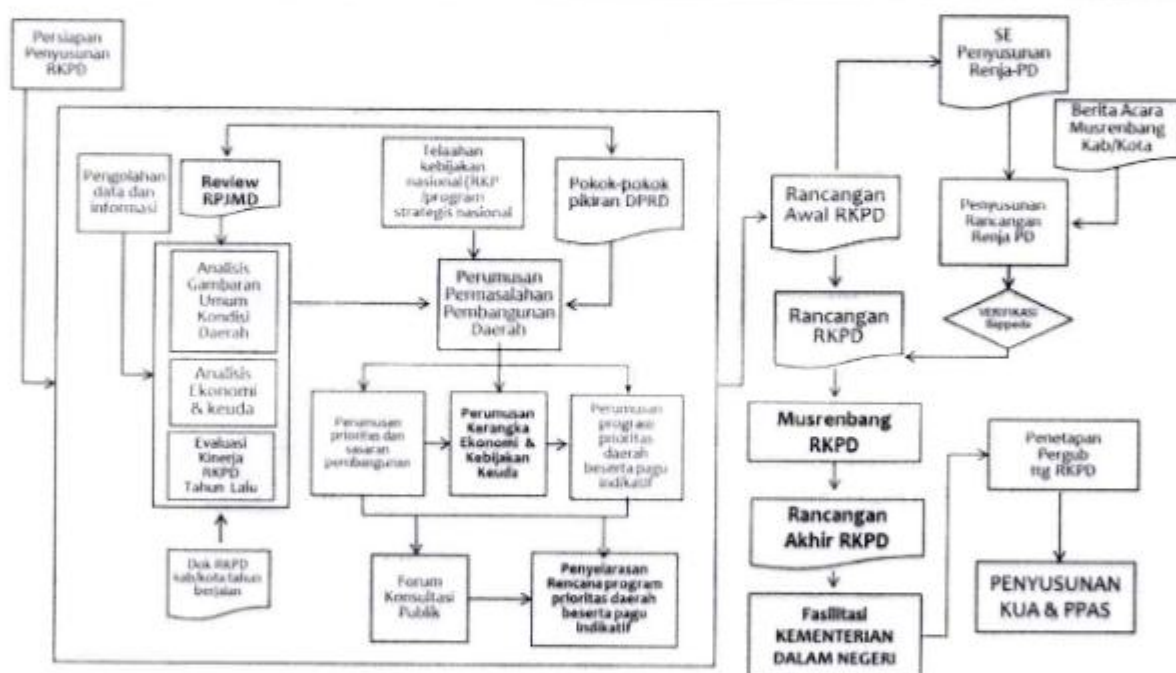
Dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik maka diperlukan sistem akuntabilitas pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan salah satunya dengan menyusun Dokumen Perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan program dan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentudengan memanfaatkan dan mengalokasikan sumberdaya yang ada. Sesuai dengan Pasal 272 dan 273 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026-2030 dimaksudkan untuk menjamin konsistensi pencapaian indikator kinerja pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya khususnya dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.

Penyusunan Perubahan Renstra juga mengacu pada Renja K/L dan Renja Provinsi dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY dengan maksud untuk mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan ditingkat nasional dengan pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026-2030 disusun melalui 4 (empat) tahapan, yaitu : (1). Persiapan penyusunan Renstra; (2). Penyusunan rancangan Renstra; (3). Penyusunan rancangan akhir Renstra; (4). Penetapan Renstra. Keempat tahapan penyusunan Renstra dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga membentuk sebuah siklus perencanaan yang utuh.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026-2030 akan sangat bermanfaat guna memberikan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat, juga sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) yakni pedoman pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya.



Sumber Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1.1
Bagan Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang no 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang;
4. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan;
10. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025- 2029;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah;

16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029, adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan pemerintahan umum.
3. Memberikan kerangka dasar untuk merencanakan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

b. Tujuan

Tujuan umum penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2025-2029, adalah:

1. Mendukung perencanaan pembangunan daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun.
2. Menjamin terciptanya integrasi, konsistensi dan sinergi antara Perangkat Daerah, pemangku kepentingan dan pihak terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam rangka membantu mewujudkan visi dan misi Bupati yang hendak dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.
5. Memberikan acuan dasar penilaian (tolok ukur) dalam penilaian kinerja penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat selama 5 (lima) tahun.
6. Merencanakan perubahan organisasi dalam lingkungan yang semakin kompleks dan membutuhkan adanya penyesuaian;
7. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi ke depan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
 - 2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 2.5.1 Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 2.5.2 Penentuan Isu Strategis
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
 - 3.2 Strategi dan kebijakan Perangkat Daerah
 - 3.3 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga Dan Renstra Provinsi
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup
- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - 4.1 Uraian Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 4.2 Uraian Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 4.3 Uraian beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
- BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

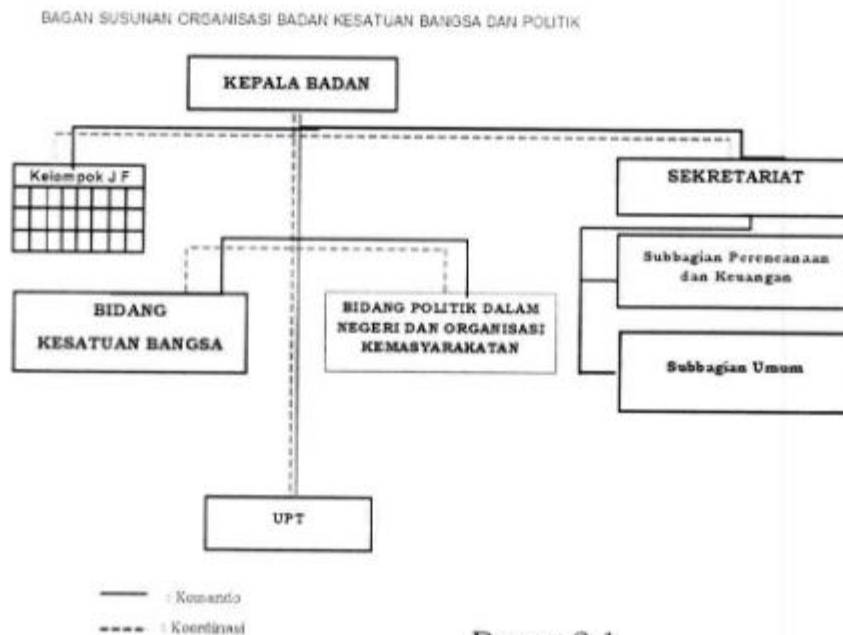
Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Penyusunan rencana Kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
8. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan;
9. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

10. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
12. Pengelolaan UPT.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah sebagai berikut :



Bagan 2.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.2. SUMBER DAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka sumber dana, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana harus dikelola secara efektif dan efisien, sebagai berikut :

1. Sumber Dana

Sumber dana (anggaran) merupakan modal utama sebuah organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh sebab itu, maka pengelolaan sumber dana (anggaran) harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, transparansi, efisiensi dan akuntabilitas anggaran.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 adalah 22 (dua puluh dua) orang, yang terdiri dari :

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak : 1 orang
2. Jabatan Administrator sebanyak : 3 orang
3. Jabatan Pengawas sebanyak : 2 orang
4. Jabatan Fungsional : 6 orang
5. Pelaksana sebanyak: 10 orang.

Dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, kondisi sumber daya aparatur baik dari sisi kompetensi, kualifikasi dan jumlah pegawai masih belum tercukupi untuk pencapaian kinerja yang optimal. Namun dengan komposisi pegawai saat ini diupayakan untuk diberdayakan sesuai dengan kompetensi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai.

Optimalisasi Potensi SDM ini dapat dilaksanakan apabila manajemen pengelolaan SDM dengan peningkatan kompetensi baik melalui pendidikan pelatihan maupun melalui pembinaan dan penilaian kinerja aparatur, serta penerapan *reward and punishment* yang ketat, akurat, adil dan seimbang.

Profesionalisme juga akan tercapai apabila setiap aparat mengetahui tugas dan kewajiban masing-masing terhadap kinerja unit kerjanya serta perlunya bimbingan teknis maupun diklat teknis.

Untuk mengetahui keadaan personil perlu juga diketahui komposisi pegawai menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat usia dan lainnya. Komposisi yang disajikan dalam tabel-tabel ini dimaksudkan agar pengelolaan SDM dan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat berlangsung optimal. Berikut tabel komposisi pegawai yang terdiri dari:

Tabel 2.1
Pegawai Badan Kesbangpol Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki-laki	9
2	Perempuan	13

Sumber data : Subbag. Umum Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.1 di atas dapat kita lihat bahwa berdasarkan jenis kelamin, dari keseluruhan jumlah PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebanyak 40,9% adalah laki-laki (9 orang) dan 59,1% adalah perempuan (13 orang).

Tabel 2.2
Pegawai Badan Kesbangpol Menurut Usia

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	< 30 th	0	5	5
2	31 th – 49 th	2	3	5
3	> 50 th	7	5	12

Sumber data : Subbag. Umum Tahun 2024

Jika di lihat dari faktor usia dalam tabel 2.2 di atas, dari keseluruhan jumlah PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebanyak 22,72% adalah PNS yang berusia < 30 th, 22,72% adalah PNS yang berusia 31 th – 49 th, dan 54,54% adalah PNS yang berusia > 50 th.

Tabel 2.3
Pegawai Badan Kesbangpol Menurut Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	I	-	-	0
2	II	1	3	4
3	III	5	6	11
4	IV	3	2	5
5	VII	-	1	1
6	IX	-	1	1

Sumber data : Subbag. Umum Tahun 2024

Menurut golongan kepegawaian dalam tabel 2.3 di atas, dari keseluruhan jumlah PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tidak ada PNS golongan I, 26% adalah PNS golongan II (6 orang), 56,52% adalah PNS golongan III (13 orang), dan 13% adalah PNS golongan IV (4 orang).

Tabel 2.4
Pegawai Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	SLTP	1	-	1
2	SLTA	5	1	6
3	DI - D3,Sarjana Muda	-	4	4
4	D4/S1	2	5	7
5	S2	3	2	5

Sumber data : Subbag. Umum Tahun 2024

Menurut tingkat pendidikan dalam tabel 2.4 di atas, dari keseluruhan jumlah PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, PNS dengan tingkat pendidikan SLTP sebanyak 4,37% (1 orang), dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 26% (6 orang), dengan tingkat pendidikan D-3 sebanyak 17,4 % (4 orang), dengan tingkat pendidikan D4/S1 sebanyak 53,85% (7 orang), dan dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 21,74% (5 orang).

Sedangkan menurut diklat kepemimpinan yang pernah diikuti, dari keseluruhan jumlah PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, PNS yang sudah mengikuti Diklat ADUM/Diklat Pimpinan IV sebanyak 16,67% (3 orang), PNS yang sudah mengikuti diklat SPAMA/Diklat Pimpinan III sebanyak 16,67% (3 orang), sedangkan sebanyak 66,67% (12 orang) belum pernah mengikuti diklat struktural. Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi PNS berdasarkan diklat

struktural yang pernah diikuti, dapat kita lihat dalam tabel 2.5. di bawah ini :

Tabel 2.5
PNS Berdasarkan Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	DIKLATPIM TK. II	1	-	0
2	DIKLATPIM TK. III	2	1	3
3	DIKLATPIM TK. IV	1	2	3

Sumber data : Subbag. Umum Tahun 2024

3. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan parasana (barang inventaris dan aset) Perangkat Daerah merupakan unsur penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum, transparansi, efisiensi dan akuntabilitas anggaran.

Disamping itu penggunaan dan pemeliharaan terhadap aset-aset ini berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan penuh tanggung jawab, untuk meminimalkan kerusakan yang mungkin timbul. Laporan barang inventaris dan aset ini dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, sehingga setiap penambahan dan pengurangan terhadap barang inventaris dan aset langsung dapat diketahui.

Jumlah aset yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 (*audited* Desember 2023) adalah sebesar Rp.1.624.040.485,37 dengan perincian sebagai berikut :

- 1. Tanah, dengan nilai aset sebesar Rp720.000.000,00
- 2. Peralatan dan mesin, dengan nilai aset sebesar Rp1.094.384.237,89
- 3. Gedung dan bangunan, dengan nilai aset sebesar Rp1.075.790.230,00
- 4. Jalan, irigasi, dan jaringan, dengan nilai aset sebesar Rp39.988.194,00
- 5. Aset tetap lainnya, dengan nilai aset sebesar Rp183.525.150,00

Untuk lebih jelasnya perincian daftar inventarisir barang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024, dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Daftar Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(audited Desember 2024)

Kode Rek.	URAIAN ASET TETAP	SALDO AWAL 31 Desember 2023(Audited)	MUTASI TAHUN 2023		SALDO AKHIR 31 Desember 2024	Ket.
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.03.01.	TANAH	720.000.000,00	-	-	720.000.000,00	
01.03.01.01.	Tanah	-	-	-	-	
01.03.02.	PERALATAN DAN MESIN	1.211.980.889,45	-	-	95.901.685,13	
01.03.02.01.	Alat Besar	-	-	-	-	
01.03.02.02.	Alat Angkutan	548.125.351,56	-	-	4.713.143,02	

Kode Rek.	URAIAN ASET TETAP	SALDO AWAL 31 Desember 2023(Audited)	MUTASI TAHUN 2023		SALDO AKHIR 31 Desember 2024	Ket.
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.03.02.03.	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	-	-	-	-	
01.03.02.04.	Alat Pertanian	-	-	-	-	
01.03.02.05.	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	347.554.023,00	-	-	20.774.750,63	
01.03.02.06.	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	54.889.054,00	-	-	-	
01.03.02.07.	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	-	-	-	-	
01.03.02.08.	Alat Laboratorium	784.000,00	-	-	293.999,88	
01.03.02.10.	Komputer	260.628.460,89	-	-	70.119.791,60	
01.03.02.10.01.	Komputer Unit	216.451.988,89	-	-	52.287.500,00	
01.03.02.10.01.01.	Komputer Jaringan	-	-	-	-	
01.03.02.10.01.02.	Personal Komputer	216.451.988,89	-	-	52.287.500,00	
01.03.02.10.02.	Peralatan Komputer	44.176.472,00	-	-	17.832.291,60	
01.03.02.10.02.03.	Peralatan Personal Komputer	44.176.472,00	-	-	17.832.291,60	
01.03.02.10.02.04.	Peralatan Jaringan	-	-	-	-	
01.03.03.	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.075.790.230,00	-	-	650.052.133,30	
01.03.03.01.	Bangunan Gedung	1.064.695.230,00	-	-	640.510.433,42	
01.03.03.02.	Monumen	-	-	-	-	
01.03.03.04.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	11.095.000,00	-	-	9.541.699,88	
01.03.04. ,	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	39.988.194,00	-	-	20.538.728,25	
01.03.04.01.	Jalan Dan Jembatan	-	-	-	-	
01.03.04.02.	Bangunan Air	19.871.000,00	-	-	3.974.199,88	
01.03.04.03.	Instalasi	-	-	-	-	
01.03.04.04.	Jaringan	20.117.194,00	-	-	16.564.528,37	
01.03.05.	Aset Tetap Lainnya	183.525.150,00	-	-	183.525.150,00	
01.03.05.01.	Bahan Perpustakaan	435.000,00	-	-	435.000,00	
01.03.05.05.	Tanaman	-	-	-	-	
01.03.05.07.	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	-	
01.03.06.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-	-	
01.03.06.01.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	
37	ASET LAIN LAIN	12.990.977,00	-	-	-	
37.01.	Aset Lain Lain	12.990.977,00	-	-	-	
	JUMLAH	3.244.275.440,45	-	-	1.670.017.696,68	

Sumber data : Laporan Aset Semester II Tahun 2024

2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang berwawasan kebangsaan, mempunyai kemauan dan kemampuan untuk belanegara, serta mengerti dan mau untuk menggunakan hak-hak politik.

Salah satu cara yang ditempuh untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut adalah dengan membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengemban tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bentuk-bentuk pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, dan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kehidupan demokrasi dan politik dalam negeri;
- c. Penyelenggaraan pembinaan budaya dan pendidikan politik;
- d. Penyelenggaraan pembinaan, dan fasilitas kelembagaan partai politik;
- e. Penyelenggaraan dan pembinaan kewaspadaan nasional;
- f. Penyelenggaraan dan pembinaan kerukunan umat beragama;
- g. Penyelenggaraan kerjasama intelejen keamanan;
- h. Penanganan konflik SARA, pemerintahan, dan penanganan konflik sosial;
- i. Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
- j. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan
- k. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan;
- l. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan;
- m. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba (narkotika dan zat adiktif lainnya).

Masyarakat Kabupaten Gunungkidul cukup responsif dalam merespon dinamika sosial, ekonomi, politik nasional hal tersebut dikarenakan kondisi masyarakatnya yang cukup heterogen, selain itu akses informasi yang cukup mudah serta mobilitas penduduknya yang cukup tinggi. Hal tersebut potensial memunculkan konflik sosial dan mampu mengancam stabilitas wilayah.

Selama kurun waktu lima tahun (2022-2026) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Kabupaten Gunungkidul di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Berbagai masalah dapat tertangani dengan baik, potensi konflik dapat diantisipasi sehingga kondisi di wilayah cukup kondusif.

Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan target/sasaran Renstra dari tahun ke tahun menunjukkan *trend* yang menggembirakan. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti persatuan dan kesatuan, pendidikan politik masyarakat, meningkatkan pemahaman akan demokrasi, kerukunan beragama dan sinergitas yang baik antara parpol, ormas/LSM dan pemerintah daerah

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan target/sasaran Renstra Tahun 2022-2026 dapat kita lihat dari tabel 2.7 di bawah ini :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 – 2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD SPM/IKK/ Indikator Lain	Target NSPK	Kabupaten Gunungkidul	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase konflik sosial yang tertangani				89%	90%	91%	92%	93%	100%	100%	100%	100%	Na	100%	112,36%	100%	Na	Na

Dari tabel 2.7 tentang pencapaian kinerja 2022-2026 tersebut di atas dapat kami uraikan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk Capaian IKU Persentase konflik sosial yang tertangani selama 5 (lima) tahun cenderung meningkat. Bahkan pada tahun 2024 capaian IKU mencapai 100%. Secara umum, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022-2026 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung dalam pencapaian kinerja, seperti kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung yang memadai serta kerjasama dan koordinasi yang baik dengan PD maupun *stakeholders* lainnya. Beberapa kegiatan yang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya yang pada umumnya tidak sesuai dengan *time schedule* yang direncanakan disebabkan karena adanya hambatan dalam pencairan dana.

Sedangkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurun waktu 2022-2026, dapat dilihat dalam tabel 2.8 dibawah ini :

Tabel 2.8
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 – 2026**

Uraian	Rasio Capaian pada tahun ke-						Target Realisasi perangkat daerah tahun ke						Rata-rata pertumbuhan					Realisasi Realisasi perangkat daerah tahun ke	
	2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
	Anggaran (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	2022	2023	2024	2025	2026		
1																			
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	2	303.220.000,00	283.273.000,00	20.000.000,00	278.721.055,00	9	277.404.038,00	Na	10	Na	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Asas, Sem, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	303.220.000,00	283.273.000,00	20.000.000,00	278.721.055,00	9	277.404.038,00	Na	10	Na	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pertanggung Jawaban Sosial Budaya	-	303.220.000,00	283.273.000,00	20.000.000,00	278.721.055,00	9	277.404.038,00	Na	10	Na	11	12	13	14	15	16	17	18
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	2.874.144.516,00	2.139.208.729,00	2.272.348.932,00	2.228.319.881,00	2.768.815.000,00	2.774.946.121,00	2.845.530.248,00	Na	Na	Na	Na	98,26	86,26	90,02	Na	Na	2.444.947.396	1.333.159.317,40
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.594.500,00	47.562.500,00	83.413.900,00	94.501.400,00	74.008.000,00	69.904.600,00	81.486.750,00	Na	Na	Na	Na	101,91	94,18	97,69	Na	Na	73.676.060	39.237.470,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.720.000,00	27.118.000,00	32.553.500,00	32.991.000,00	49.858.000,00	44.950.000,00	31.401.750,00	Na	Na	Na	Na	98,34	95,64	96,46	Na	Na	37.650.100	20.469.350,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.174.000,00	17.070.000,00	25.672.500,00	30.527.400,00	19.750.000,00	19.065.600,00	25.410.000,00	Na	Na	Na	Na	95,61	93,19	98,98	Na	Na	22.338.960	12.080.400,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Penilaian RKA-SKPD	249.900,00	300.000,00	90.000,00	360.000,00	300.000,00	240.900,00	87.300,00	Na	Na	Na	Na	100,00	61,33	96,87	Na	Na	259.960	104.180,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	649.800,00	475.000,00	212.500,00	750.000,00	960.000,00	440.700,00	209.500,00	Na	Na	Na	Na	65,21	75,16	98,59	Na	Na	617.460	203.240,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Penilaian DPA-SKPD	450.000,00	430.000,00	212.500,00	430.000,00	480.000,00	440.200,00	141.000,00	Na	Na	Na	Na	90,82	60,23	66,35	Na	Na	400.500	169.840,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	2.349.900,00	1.169.500,00	24.962.900,00	29.093.000,00	2.450.000,00	2.345.000,00	24.072.500,00	Na	Na	Na	Na	96,83	99,91	95,22	Na	Na	11.985.060	5.517.600,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.000.000,00	410.000,00	410.000,00	900.000,00	2.347.900,00	165.000,00	Na	Na	Na	Na	0,00	100,00	40,24	Na	Na	544.000	702.960,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.486.879.246,00	1.585.498.379,00	1.578.380.901,00	1.787.838.741,00	2.326.722.000,00	2.450.974.933,00	1.557.000.979,00	Na	Na	Na	Na	98,79	91,45	94,65	Na	Na	1.935.856.033	1.891.562.916,40

Urutan	Rasio Capaian pada tahun ke-					Tingkat Heretis perangat tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan					Realisasi Rendra perangat daerah tahun ke-	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
	Anggaran (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2.471.829.346,00	1.570.303.870,00	1.548.303.401,00	1.672.018.241,00	2.376.622.000,00	2.443.924.833,00	1.443.468.420,00	1.526.258.220,00	Na	Na	98,79	91,45	98,64	Na	Na	1.917.895.453	1.062.530.516,40
2	1.550.000,00	1.125.500,00	600.000,00	1.325.000,00	2.000.000,00	1.550.000,00	1.125.000,00	600.000,00	Na	Na	100,00	99,96	100,00	Na	Na	1.320.100	655.000,00
3	5.500.000,00	6.030.000,00	31.477.500,00	34.495.000,00	5.700.000,00	5.600.000,00	5.246.350,00	31.141.750,00	Na	Na	100,00	86,89	89,93	Na	Na	16.640.500	8.377.400,00
3	750.000,00	11.050.000,00	18.831.500,00	18.831.500,00	750.000,00	750.000,00	11.045.000,00	8.554.568,00	Na	Na	100,00	99,95	76,98	Na	Na	4.526.380	4.069.913,60
1	750.000,00	11.050.000,00	18.831.500,00	37.735.600,00	2.000.000,00	750.000,00	11.045.000,00	8.554.568,00	Na	Na	100,00	99,95	76,98	Na	Na	12.473.500	4.069.913,60
4	12.147.852,00	244.594.800,00	318.424.800,00	177.765.660,00	173.780.000,00	67.048.275,00	182.057.185,00	201.478.417,00	Na	Na	92,92	41,73	63,27	Na	Na	197.330.630	74.115.176,20
1	2.696.800,00	5.390.600,00	4.200.000,00	4.275.660,00	3.000.000,00	2.693.000,00	5.385.700,00	4.201.400,00	Na	Na	99,86	99,73	99,82	Na	Na	3.904.212	2.455.920,00
2	32.457.000,00	42.150.500,00	115.837.500,00	28.085.500,00	48.500.000,00	32.407.000,00	41.322.000,00	112.336.000,00	Na	Na	99,75	98,03	96,98	Na	Na	53.412.100	37.213.400,00
3	5.998.992,00	5.486.200,00	6.110.000,00	4.862.660,00	6.000.000,00	5.081.000,00	5.441.000,00	5.722.800,00	Na	Na	99,70	96,14	93,66	Na	Na	5.685.968	3.428.960,00
4	14.215.100,00	9.796.500,00	7.203.300,00	7.060.500,00	14.500.000,00	14.164.275,00	9.376.300,00	7.293.000,00	Na	Na	99,64	95,71	100,00	Na	Na	10.577.760	6.167.315,00
5	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.880.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.380.000,00	Na	Na	90,00	90,00	90,00	Na	Na	1.536.000	548.000,00
6	15.550.000,00	180.557.000,00	183.775.000,00	132.241.000,00	98.500.000,00	10.715.000,00	39.446.880,00	70.843.217,00	Na	Na	68,91	21,85	38,55	Na	Na	122.204.600	24.281.581,20
5	0,00	13.826.000,00	-	60.540.000,00	0,00	0,00	13.830.000,00	-	Na	Na	0,00	99,31	0,00	Na	Na	16.893.200	2.766.000,00
1	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	13.826.000,00	-	60.540.000,00	-	-	13.830.000,00	-	Na	Na	0,00	99,31	0,00	Na	Na	16.893.200	2.766.000,00
6	79.480.000,00	94.600.030,00	179.592.032,00	80.464.000,00	81.280.000,00	64.855.276,00	82.525.315,00	95.952.255,00	Na	Na	81,50	87,24	53,43	Na	Na	103.083.216	48.668.549,20
1	20.425.000,00	31.070.000,00	56.060.000,00	33.385.000,00	20.525.000,00	20.350.000,00	30.150.000,00	36.377.500,00	Na	Na	99,63	97,17	64,88	Na	Na	32.373.000	17.382.500,00

Uraian		Rasio Capaian pada tahun ke-					Target Rencanra perangkat daerah tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan					Realisasi Rencanra per anggar daerah tahun ke	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
		Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2	42.600.000,00	41.999.000,00	103.178.032,00	42.204.000,00	43.900.000,00	28.310.276,00	31.516.815,00	39.276.755,00	Na	Na	66,46	75,04	38,07	Na	Na	54.776.216	19.820.799,20
	3	16.455.000,00	21.531.000,00	20.354.000,00	4.875.000,00	18.455.000,00	16.195.000,00	20.818.500,00	20.303.000,00	Na	Na	98,42	96,69	95,75	Na	Na	15.934.000	11.463.300,00
	7	122.292.818,00	142.016.000,00	101.695.400,00	96.176.000,00	112.825.000,00	121.421.037,00	141.228.044,00	101.857.279,00	Na	Na	99,29	99,45	99,46	Na	Na	113.781.856	72.341.272,00
	1	71.855.000,00	76.693.500,00	71.857.400,00	62.600.000,00	66.250.000,00	71.698.126,00	75.905.644,00	71.682.278,00	Na	Na	98,69	98,97	99,62	Na	Na	69.651.180	43.709.399,20
	2	6.000.000,00	18.540.000,00	11.570.000,00	12.710.000,00	10.700.000,00	6.000.000,00	10.640.000,00	11.300.000,00	Na	Na	100,00	100,00	97,67	Na	Na	10.324.000	5.586.000,00
	3	44.437.878,00	51.682.500,00	5.878.000,00	8.865.000,00	30.375.000,00	44.361.505,00	51.682.500,00	5.875.000,00	Na	Na	98,83	100,00	99,96	Na	Na	28.246.676	20.393.881,80
	4	Pendanaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000,00	12.300.000,00	6.000.000,00	5.500.000,00		3.000.000,00	12.300.000,00	Na	Na	0,00	100,00	100,00	Na	Na	5.360.000	3.960.000,00
	3	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	207.168.000,00	383.485.000,00	1.101.928.400,00	1.371.444.234,00	189.740.500,00	374.615.626,00	1.045.982.559,00	Na	Na	91,59	97,69	94,82	Na	Na	650.845.127	322.067.737,00
	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	207.168.000,00	383.485.000,00	1.101.928.400,00	1.371.444.234,00	189.740.500,00	374.615.626,00	1.045.982.559,00	Na	Na	91,59	97,69	94,82	Na	Na	650.845.127	322.067.737,00
	1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bela Tunggul Ila dan Segar Kebangsaan		383.485.000,00	1.001.330.900,00	1.172.845.000,00	-	374.615.626,00	945.385.163,00	Na	Na	0,00	97,69	94,41	Na	Na	331.572.180	204.000.157,80

Uraian	Rasio Capaian pada tahun ke-						Target Rencstra per angkut daerah tahun ke-						Rata-rata pertumbuhan					Realisasi Rencstra per angkut daerah tahun ke-						
	2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2025		2026		Anggaran	Realisasi		
	Anggaran (Rp.)	2	Anggaran (Rp.)	3	Anggaran (Rp.)	4	Anggaran (Rp.)	5	Anggaran (Rp.)	6	Realisasi (Rp.)	7	Realisasi (Rp.)	8	Realisasi (Rp.)	9	Realisasi (Rp.)	10	Realisasi (Rp.)	11				
1	207.168.000,00	2	-	3	100.597.500,00	4	1.198.599.234,00	5	90.000.000,00	6	189.740.500,00	7	-	8	100.597.396,00	9	Na	10	Na	11	17	319.272.947	18	58.067.579,26
4	1.548.006.758,00	1.548.006.758,00	21.086.690.658,00	21.086.690.658,00	30.448.747.868,00	30.448.747.868,00	1.602.728.340,00	1.602.728.340,00	1.291.407.758,00	1.291.407.758,00	1.535.164.858,00	1.535.164.858,00	21.060.979.807,00	21.060.979.807,00	30.420.108.668,00	30.420.108.668,00	Na	Na	Na	Na	11.195.516.276	10.603.250.666,60		
1	1.323.146.758,00	1.323.146.758,00	21.086.690.658,00	21.086.690.658,00	30.448.747.868,00	30.448.747.868,00	1.602.728.340,00	1.602.728.340,00	1.291.407.758,00	1.291.407.758,00	1.535.164.858,00	1.535.164.858,00	21.060.979.807,00	21.060.979.807,00	30.420.108.668,00	30.420.108.668,00	Na	Na	Na	Na	11.195.516.276	10.603.250.666,60		
1	1.323.146.758,00	1.323.146.758,00	370.180.900,00	370.180.900,00	36.354.700,00	36.354.700,00	106.149.600,00	106.149.600,00	142.895.000,00	142.895.000,00	1.314.579.658,00	1.314.579.658,00	383.736.040,00	383.736.040,00	37.308.500,00	37.308.500,00	Na	Na	Na	Na	387.946.302	340.130.841,40		
2	224.860.000,00	224.860.000,00	20.710.509.758,00	20.710.509.758,00	30.412.303.168,00	30.412.303.168,00	1.496.578.740,00	1.496.578.740,00	1.143.512.758,00	1.143.512.758,00	220.635.200,00	220.635.200,00	20.707.243.758,00	20.707.243.758,00	30.387.728.168,00	30.387.728.168,00	Na	Na	Na	Na	10.797.570.885	10.263.119.855,20		



Uraian		Rasio Capaian pada tahun ke-						Target Rencana perangkat daerah tahun ke-						Rata-rata pertumbuhan					Realisasi Rencana perangkat daerah tahun ke-		
		2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2025			2026
		Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pertahanan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	585.040.000,00	2.711.600,00	1.240.000,00	1.246.100,00	62.100.000,00	264.162.592,00	2.466.450,00	1.237.475,00	Na	Na	0,00	90,96	99,80	Na	Na	13.459.340	740.785,00		
	2	Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	585.040.000,00	24.600.000,00	27.600.000,00	48.385.000,00	94.249.897,00	15.800.000,00	16.000.000,00	Na	Na	Na	45,08	64,23	57,97	Na	Na	156.174.979	59.192.518,40		
	3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	283.968.000,00	280.371.000,00	159.917.400,00	234.614.000,00	153.200.000,00	267.881.000,00	275.956.575,00	148.656.875,00	Na	Na	Na	94,33	98,36	92,93	Na	227.463.080	138.485.450,00		
	4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	19.455.000,00	15.954.900,00	32.014.900,00	124.200.000,00	0	18.507.500,00	15.954.900,00	Na	Na	Na	95,13	100,00	Na	Na	38.324.960	6.992.480,00		
	5	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	0	131.200.000,00	160.300.000,00	142.619.800,00	700.300.000,00	0	115.400.000,00	119.150.000,00	Na	Na	Na	0,00	87,96	74,33	Na	226.883.960	46.910.000,00		

Urutan	Rasio Capaian pada tahun Ke-					Target Rencstra per anggar di daerah tahun ke					Rata-rata pertambahan					Realisasi Rencstra per anggar di daerah tahun ke	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
JUMLAH	5.849.567.074,00	25.095.683.287,00	34.822.839.561,00	5.663.301.175,00	4.347.047.758,00	5.420.553.871,00	22.897.294.597,00	34.394.508.603,00	Na	Na							

Dari tabel 2.8 tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa secara umum anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2024 menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan.

Pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 7 Program dengan 13 kegiatan, dari jumlah anggaran sebesar Rp34.822.839.501,00 terealisasi sebesar Rp34.394.508.603,00 atau 98,78%. Terdapat kegiatan yang terkendala pelaksanaannya karena adanya pandemi covid-19 sehingga capaian keuangan tidak dapat maksimal.

Disamping itu juga dilatarbelakangi oleh beberapa adanya perubahan peraturan perundang-undangan baik pusat maupun yang mewajibkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang kesatuan bangsa. Alokasi pembagian anggaran per program/kegiatan setiap tahun tidak sama, tergantung pada prioritas pencapaian sasaran, maupun prioritas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan hasil musrenbang.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur Pemerintah Daerah, Unsur Vertikal , Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik.

2.5. Permasalahan Dan Isu Strategis

2.5.1 Permasalahan Pelayanan

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah.

Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini, maka permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain sebagaimana yang terdapat Tantangan dan Peluang Sebagai berikut:

A. Tantangan

Tantangan yang dihadapi :

1. Penurunan nilai-nilai nasionalisme yang ada di masyarakat
2. Penurunan Pemahaman terhadap ideologi Pancasila
3. Banyaknya pendatang mempengaruhi penurunan nilai-nilai kearifan lokal
4. Perkembangan Teknologi Informasi yang berdampak pada kehidupan Masyarakat

5. Kelompok Sasaran yang menjadi mitra kerja Badan Kesatuan bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul Adalah Semua Warga Masyarakat yang bergabung dalam Organisasi Masyarakat dan Anggota serta pengurus Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Generasi Muda dan Anak sekilah yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

B. Peluang

1. Peraturan perundangan yang mendukung kinerja lembaga
2. Koordinasi dan dukungan lintas lembaga untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
3. Kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur
4. Mencari terobosan dengan mengusulkan Kegiatan berbasis Budaya dan Inovasi dari sumber Dana Keistimewaan DIY
5. Meningkatkan Kerjasama dan kolaborasi dengan OPD lainnya dalam mewujudkan tujuan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam mencapai target kinerja.

2.5.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta telaahan terhadap Renstra Kemendagri, Renstra Badan Kesbangpol DIY, dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, maka isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi kesatuan bangsa yang bisa diidentifikasi sesuai urutan prioritas adalah sebagai berikut :

1. Isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah
 - a. Persatuan dan kesatuan nasional;
 - b. Isu keamanan dan ketertiban;
 - c. Kesadaran dalam menegakkan demokrasi dan Hak Azasi Manusia;
 - d. Kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang).
2. Isu strategis yang berkaitan dengan kondisi internal organisasi perangkat daerah
 - a. Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki motivasi, komitmen, dan integritas kerja yang baik.
 - b. Sarana dan prasarana belum memadai
3. Isu strategis diluar kewenangan namun berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah
 - a. Meningkatnya kunjungan wisata;
 - b. Perkembangan Iptek, dan keterbukaan informasi;
 - c. Globalisasi

Tabel 2.9
Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum	dampak negatif yang diakibatkan dari pesatnya perkembangan sosial, ekonomi, kultural, pariwisata, dan teknologi informasi	Belum optimalnya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan didukung kepastian hukum	Mewujudkan masyarakat yang inklusif dan damai dengan berdasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, peraturan hukum, tata pemerintahan yang baik di semua tingkat, serta lembaga yang transparan, efektif, dan akuntabel.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	Deteksi Dini, cegah dini dan penanganan permasalahan ideologi politik ekonomi sosial budaya dan hankam	Potensi terjadinya konflik, baik konflik SARA, konflik sosial, maupun konflik pemerintahan akibat pesatnya perkembangan sosial, kultural, pariwisata, dan teknologi
	rendahnya peran serta ormas yang aktif dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan.					Perlunya penguatan peran serta ormas secara aktif dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maupun dalam pengambilan keputusan sehari-hari.
	masih rendahnya pemahaman politik masyarakat .					Perlunya penguatan partisipasi politik warga secara aktif baik dalam pemilu, pilkades, musdes, musrenbang, maupun dalam pengambilan keputusan sehari-hari.
	masyarakat mudah terpengaruh dengan informasi yang belum tentu benar.					Potensi muncul/ berkembangnya gerakan terorisme, radikalisme, fundamentalisme dan separatisme yang dapat menyusup sampai kawasan padukuhan/ pelosok.
	Usia rentan pada anak remaja dan pelajar yang mudah terprovokasi.					Potensi kejadian tawuran / kenakalan remaja/ pelajar, penyalahgunaan narkoba, dll

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	Deteksi Dini, cegah dini dan penanganan permasalahan ideologi politik ekonomi sosial budaya dan hankam	



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Secara umum Visi Adalah Gambaran yang akan di tuju atau di ciptakan di masa yang akan datang. Sementara itu sesuai dengan ketentuan Visi Adalah rumusan umum keadaan yang diinginkan pada masa akhir periode perencanaan Pembangunan. Berdasarkan visi Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah kabupaten Gunungkidul dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 - 2029 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan berfokus pada Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Keamanan, Daerah Tangguh, Dan Transformasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat;
2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah dan inklusif dan kreatif;
3. Membangun kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal;
4. Setia pada Amanat Penderitaan rakyat Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban;
5. Memajukan Kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Dari visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 tersebut di atas, dapat kami simpulkan bahwa tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat mendukung pencapaian visi Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan masyarakat yang bermartabat, terutama dalam aspek politik, yaitu mendorong masyarakat untuk mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang

demokratis, menjamin terlaksananya hak-hak politik masyarakat, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam berbagai bidang.

Sedangkan misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yang sesuai dan mewadahi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kami jabarkan sebagai berikut :

misi, yaitu : Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.

dengan Tujuan : Pamong Nglayani & Ngayomi: Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum bagi warga melalui transformasi tata kelola pelayanan publik, pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi, peningkatan kesejahteraan ASN, dan perluasan perlindungan dan bantuan hukum bagi warga. Penguatan reformasi birokrasi kalurahan.

Sasaran KETIGA, yaitu: Crime Rate (Ketentraman Ketertiban Masyarakat) dengan 6 program, yaitu :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai unsur pendukung pemerintah daerah yang mempunyai ketugasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. pengkoordinasian kebijakan operasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen dan keamanan, bina masyarakat perbatasan, penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, dan pengawasan orang asing serta lembaga asing;
4. pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa;

5. pengkajian masalah strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
6. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa, dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan;
7. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan;
8. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan;
9. pelaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga;
10. pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa;
11. pengelolaan ketatausahaan kantor.

Kondisi sosial dan politik Kabupaten Gunungkidul yang majemuk dan kompleks menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Secara umum, masyarakat di zona tengah merupakan masyarakat yang urban (perkotaan), plural secara etnik dan agama, serta menjadi pusat perdagangan dan pendidikan. Sementara, zona utara dan zona selatan cenderung identik dengan kehidupan yang rural (pedesaan), namun menjadi pusat kegiatan pariwisata dan pertanian. Di sisi lain, Gunungkidul tidak pernah lepas dari dinamika politik baik di tingkat lokal maupun nasional. Karakter sosial yang kompleks antar zona, serta situasi politik yang terus berubah ini menuntut kesigapan pengampu urusan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk selalu tanggap dan responsif. Dengan demikian, kesatuan dan persatuan bangsa, dan stabilitas sikon sospol tetap dapat senantiasa diciptakan.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sosial dan politik yang menjadi tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Identifikasi permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi ini sangat penting karena sangat mempengaruhi pelayanan Perangkat Daerah. Permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi yang diidentifikasi tersebut menjadi dasar pemikiran ditetapkannya Rencana Strategis lima tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka melaksanakan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Berdasarkan konteks sosial dan politik yang ada di Kabupaten Gunungkidul, Secara rinci gambaran tujuan dan sasaran yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik											
- Terwujudnya Kondisi Wilayah yang Aman, Tertib, dan Tenram	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM		Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	6,87	6,69	6,7	6,71	6,72	6,73	6,73	
		Meningkatnya pemahaman anggota Parpol dan Ormas terhadap pancasila dan bela negara melalui pendidikan politik	Persentase Partai Politik, Ormas Yang Melaksanakan Sosialisasi Bela Negara Dan Wawasan Kebangsaan (%)	-	70	70,01	70,02	70,03	70,04	70,05	
		Meningkatnya Ketahanan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan Masyarakat	Persentase Konflik Sosial Yang Tertangani (%)	92	93	94	95	96	97	98	

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan tahunan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pentahapan Renstra seperti yang tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Pentahapan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Penguatan dasar kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM.	Percepatan pelaksanaan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan pancasila, demokrasi dan HAM.	Peningkatan pelaksanaan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan pancasila, demokrasi dan HAM.	Optimalisasi pelaksanaan kehidupan bermasyarakat at yang berlandaskan pancasila, demokrasi dan HAM.	Pemantapan pelaksanaan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan pancasila, demokrasi dan HAM.

3.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya dapat dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) layanan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tahun 2025-2029, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merumuskan strategi melalui metode SWOT(*strengths*/kekuatan,*weaknesses*/kelemahan,*opportunities*/peluang, dan *threats*/tantangan), sebagai berikut :

Tabel 3.3

Analisis Faktor-faktor Internal dan Eksternal

Faktor Internal			
No	Kekekuatan (<i>Strength</i>)	No	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
S-1	Dukungan APBD yang memadai	W-1	Fasilitas pendukung kerja memiliki motivasi, komitmen, dan integritas kerja yang baik.
S-2	Peran Lembaga yang sangat strategis dalam pengembangan persatuan dan kesatuan bangsa	W-2	Kemampuan realisasi anggaran dan kegiatan sangat dipengaruhi kondisi yang situasional wilayah/nasional
S-3	Jumlah dan etos kerja aparatur yang cukup memadai	W-3	Volume pekerjaan dan anggaran antar bidang/unit kurang berimbang
Faktor Eksternal			
No	Peluang (<i>Opportunities</i>)	No	Ancaman (<i>Threats</i>)
O-1	Peraturan perundangan yang mendukung kinerja lembaga	T-1	Semakin kompleksnya permasalahan persatuan dan kesatuan bangsa
O-2	Koordinasi dan dukungan lintas lembaga untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi	T-2	Tuntutan peningkatan kualitas kinerja dan akuntabilitas Lembaga
O-3	Kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur	T-3	Masih kurang responsifnya mitra Lembaga terhadap program kerja Lembaga

Penilaian faktor internal dan eksternal dilakukan untuk menentukan faktor kunci strategis dari masing-masing S, W, O, dan T sehingga akan terpilih 4 (empat) faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan 4 (empat) faktor eksternal (peluang dan tantangan). Penilaian dilakukan dengan menggunakan analisis USG (*Urgency, Serious, Growth*) dengan menggunakan skala nilai 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebagai berikut :

- Angka 5 memiliki USG yang relatif sangat tinggi
- Angka 4 memiliki USG yang relatif tinggi
- Angka 3 memiliki USG yang relatif cukup tinggi
- Angka 2 memiliki USG yang relatif rendah
- Angka 1 memiliki USG yang relatif sangat rendah

Hasil analisis USG selanjutnya disajikan dalam Tabel 3.4

Tabel 3.4
Analisis USG Faktor Internal dan Eksternal

Identifikasi Faktor Internal					
No	Kekekuatan (<i>Strength</i>)	U	S	G	Total
1	Dukungan APBD yang memadai	5	5	4	14
2	Peran Lembaga yang sangat strategis dalam pengembangan persatuan dan kesatuan bangsa	4	4	4	12
3	Jumlah dan etos kerja aparatur yang cukup memadai	4	4	3	11
No	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)				
1	Fasilitas pendukung kerja belum memadai	4	4	3	11
2	Kemampuan realisasi anggaran dan kegiatan sangat dipengaruhi kondisi yang situasional wilayah/nasional	4	4	3	11
3	Volume pekerjaan dan anggaran antar bidang/unit kurang berimbang	4	3	3	10
Identifikasi Faktor Eksternal					
No	Peluang (<i>Opportunities</i>)				
1	Peraturan perundangan yang mendukung kinerja lembaga	5	5	3	13
2	Koordinasi dan dukungan lintas lembaga untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi	5	4	3	12
3	Kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur	4	4	3	11
No	Ancaman (<i>Threats</i>)				
1	Semakin kompleksnya permasalahan persatuan dan kesatuan bangsa	4	4	4	12
2	Tuntutan peningkatan kualitas kinerja dan akuntabilitas Lembaga	4	4	3	11
3	Masih kurang responsif mitra Lembaga terhadap proram kerja Lembaga	4	3	3	10

Penentuan Sasaran Strategis Prioritas Faktor Kunci Strategis

Faktor kunci strategis adalah faktor yang memiliki total nilai bobot USG yang terbesar di antara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sasaran yang akan dicapai. Dari hasil analisis USG pada tabel 3.4 di atas dapat diketahui faktor-faktor kunci strategis seperti tertera dalam Tabel 3.5:

Tabel 3.5
Faktor-faktor Strategis

SWOT	Faktor Kekuatan Kunci Strategis	USG	Total
S	Dukungan APBD yang memadai	14	37
	Peran Lembaga yang sangat strategis dalam pengembangan persatuan dan kesatuan bangsa	12	
	Jumlah dan etos kerja aparatur yang cukup memadai	11	
W	Fasilitas pendukung kerja belum memadai	11	32
	Kemampuan realisasi anggaran dan kegiatan sangat dipengaruhi kondisi yang situasional wilayah/nasional	11	
	Volume pekerjaan dan anggaran antar bidang/unit kurang berimbang	10	
O	Peraturan perundangan yang mendukung kinerja lembaga	13	36
	Koordinasi dan dukungan lintas lembaga untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi	12	
	Kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur	11	
T	Semakin kompleksnya permasalahan persatuan dan kesatuan bangsa	12	33
	Tuntutan peningkatan kualitas kinerja dan akuntabilitas Lembaga	11	
	Masih kurang responsif mitra Lembaga terhadap proram kerja Lembaga	10	

Tabel 3.6
Penentuan Alternatif Strategi

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	Peluang (O) : 1. Peraturan perundangan yang mendukung kinerja lembaga 2. Koordinasi dan dukungan lintas lembaga untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi 3. Kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur	Tantangan (T) : 1. Semakin kompleksnya permasalahan persatuan dan kesatuan bangsa 2. Tuntutan peningkatan kualitas kinerja dan akuntabilitas Lembaga 3. Masih kurang responsif mitra Lembaga terhadap proram kerja Lembaga
Kekuatan (S) : 1. Dukungan APBD yang memadai 2. Peran Lembaga yang sangat strategis dalam pengembangan persatuan dan kesatuan bangsa 3. Jumlah dan etos kerja aparatur yang cukup memadai	Alternatif Strategi : 1. Mengoptimalkan penggunaan anggaran secara normatif sesuai peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Lembaga 2. Mengoptimalkan kesempatan meningkatkan kualitas SDM Aparatur untuk menambah etos kerja aparatur	Alternatif Startegi : 1. Perbaiki Perencanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi permasalahan persatuan dan kesatuan bangsa 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa
Kelemahan (W) : 1. Fasilitas pendukung kerja belum memadai 2. Kemampuan realisasi anggaran dan kegiatan sangat dipengaruhi kondisi yang situasional wilayah/nasional 3. Volume pekerjaan dan anggaran antar bidang/unit kurang berimbang	Alternatif Startegi : 1. Maksimalkan pemanfaatan fasilitas pendukung kerja (sarana prasarana) yang ada disertai koordinasi yang baik lintas lembaga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga 2. Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh Bidang bekerja sesuai SOP	Alternatif Strategi : 1. Maksimalkan pemanfaatan fasilitas pendukung kerja (sarana prasarana) serta anggaran yang ada dalam upaya menghadapi semakin kompleksnya permasalahan persatuan dan kesatuan bangsa 2. Atasi kurang memadainya fasilitas kantor untuk meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas lembaga

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut, bagaimanapun juga perlu menilik kondisi internal. Di antara kondisi internal yang sangat berpengaruh adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Terkait dengan sarana dan prasarana;
3. Terkait dengan jejaring (*networks*) yang dimiliki.

Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugasnya juga menghadapi hal-hal di luar kewenangannya, dan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal-hal tersebut disebabkan antara lain semakin meningkatnya jumlah pendatang, serta semakin masifnya kunjungan wisata, yang menuntut kesiapan dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan. Hal tersebut menuntut perencanaan yang strategis agar tugas, fungsi dan wewenang dapat dilaksanakan dengan baik dalam lima tahun ke depan.

Rumusan pernyataan strategi, dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima tahun mendatang dituangkan pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7
Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik	Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan konflik sosial dimasyarakat	penguatan koordinasi, kerja sama, networking/ jejaring dengan TNI, Polri, Kejaksaan PD terkait, Tim pengumpul data dan informasi strategis, FKDM, BNK, dan mitra kerja dalam penanganan konflik	
		meningkatkan stabilitas dan keteraturan sosial melalui penguatan pemantauan politik serta pencatatan organisasi kemasyarakatan	peningkatan pemahaman Ormas dan parpol terhadap peraturan perundangan yang berlaku	
		meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses demokrasi	pengembangan demokrasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (ASN, Perangkat desa, Swasta, pelaku usaha, pemuda, remaja, pelajar, mahasiswa, tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh difabel.)	
		meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai2 pancasila dalam berbagai aspek kehidupan	pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa kepada seluruh lapisan masyarakat (ASN, Perangkat desa, Swasta, pelaku usaha, pemuda, remaja, pelajar, mahasiswa, tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh difabel, tokoh ormas)	

Adapun rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	Terwujudnya masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban		
Misi 4	Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat , Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM	meningkatkan pemahaman anggota parpol dan ormas terhadap pancasila dan bela negara melalui pendidikan politik	1 Peningkatan Penanganan Konflik sosial yang diselesaikan	penguatan koordinasi, kerja sama, networking/ jejaring dengan TNI, Polri, Kejaksaan PD terkait, Tim pengumpul data dan informasi strategis, FKDM, BNK, dan mitra kerja dalam penanganan konflik
	Meningkatnya ketahanan IPOLEK SOSBUD HANKAM Masyarakat	2 Peningkatan Keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan	peningkatan pemahaman Ormas dan parpol terhadap peraturan perundangan yang berlaku
		3 Peningkatan Etika dan Budaya Politik	pengembangan demokrasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (ASN, Perangkat desa, Swasta, pelaku usaha, pemuda, remaja, pelajar, mahasiswa, tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh difabel,)
		4 Peningkatan Kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa kepada seluruh lapisan masyarakat (ASN, Perangkat desa, Swasta, pelaku usaha, pemuda, remaja, pelajar, mahasiswa, tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh difabel, tokoh ormas)

Lebih jauh, telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sebagaimana tertuang dalam RPJMD, juga terkait dengan identifikasi permasalahan-permasalahan yang harus ditangani, sekaligus faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penjabaran permasalahan, serta faktor-faktor penghambat dan pendorong tersebut lebih detil dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah ini :

TABEL 3.9
Identifikasi Permasalahan, Faktor Penghambat, dan Pendorong Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi KD/WKD	Misi KD/WKD	Tujuan KD/WKD	Sasaran KD/WKD	Identifikasi Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban	Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas (Transformasi Tata Kelola)	Ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	1. Potensi terjadinya konflik, baik konflik SARA, konflik sosial, maupun konflik pemerintahan akibat pesatnya perkembangan sosial, kultural, pariwisata, dan teknologi	1. Kualitas sumberdaya yang perlu ditingkatkan	1. Jumlah sumberdaya kesatuan bangsa yang memadai
					2. Kompetensi aparatur belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan	2. Komitmen pimpinan yang kuat dalam memajukan visi dan misi kesatuan bangsa
				2. Potensi muncul/ berkembangnya gerakan terorisme, radikalisme, fundamentalisme dan separatisme yang dapat menyusup sampai kawasan padukuhan/ pelosok	3. Sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan	3. Dukungan anggaran yang memadai
					4. Jalinan sinergitas Tupoksi antar bidang yang perlu diperkuat	4. Kebijakan pembangunan wawasan kebangsaan dan politik yang tepat manfaat dan tepat sasaran
					5. Peran dan fungsi lembaga non struktural (FKUB, BNK, FKDM, FPK, PPWK, dll) yang perlu ditingkatkan	

Visi KD/WKD	Misi KD/WKD	Tujuan KD/WKD	Sasaran KD/WKD	Identifikasi Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5	6	7
				3. Perlunya penguatan partisipasi politik warga secara aktif baik dalam pemilu, pemilukada, pilkades, musdes, musrenbang, maupun dalam pengambilan keputusan sehari-hari.	6. Pelaksanaan Tupoksi yang belum optimal	
				4. Perlunya penguatan peran serta ormas/LSM secara aktif dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maupun dalam pengambilan keputusan sehari-hari.	7. Akses terhadap data dan informasi yang perlu dioptimalkan	5. Dukungan pengembangan Informasi dan Teknologi dan jaringan yang memadai
				5. Potensi kejadian tawuran / kenakalan remaja/ pelajar, penyalahgunaan narkoba, dll		

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

Di samping memastikan sinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga melakukan telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY. Dengan Prioritas nawacita sebagai payung utama, aspek utama telaahan mencakup visi dan misi Kementerian Dalam Negeri, serta visi, misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, sebagai berikut :

Tabel 3.10

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Prioritas Nawacita ke 9	Sasaran Strategis Kemendagri	Sasaran Strategis Bakesbangpol DIY
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.	Memperkuat reformasi politik, hokum dan tata kelola	Penguatan reformasi Birokrasi dan peningkatan Kualitas Layanan Publik

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025–2029, pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun rencana program, kegiatan, dan subkegiatan secara sistematis dan terukur. Rencana ini dirancang agar sejalan dengan visi dan misi Bupati terpilih serta menjawab kebutuhan strategis masyarakat, khususnya dalam bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Pelaksanaan program dimulai pada tahun 2026 hingga tahun 2030, dengan tahun 2030 berfungsi sebagai momentum strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan menjadi pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 sebagai bagian dari transisi menuju RPJMD periode berikutnya (2030–2034). Adapun rincian program, kegiatan, dan subkegiatan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun. Adapun penjelasan terkait program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

4.1. Uraian Program

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan, yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program. Indikator kinerja program menunjukkan capaian keberhasilan program yang mencerminkan outcome. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari masing-masing sub kegiatan dalam satu program. Selama periode tahun 2025-2029. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merencanakan akan melaksanakan 7 (tujuh) program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.

4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian program yang sudah ditetapkan. Kegiatan juga merupakan serangkaian aktivitas Pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil dari suatu program. Dengan melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan atas kebijakan instansi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun kedepan diharapkan dapat mewujudkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara profesional terhadap tugas dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul serta mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sejumlah 13 (tiga belas) kegiatan yang terdiri dari:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- i. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik;
- j. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- k. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- l. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
- m. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya.

4.3. Uraian beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025-2029 secara terperinci gambaran Teknik merumuskan Program/ Kegiatan/

Sub Kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul, dapat dilihat dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik							
- Terwujudnya Kondisi Wilayah yang Aman, Tertib, dan Tentram	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM	Meningkatnya pemahaman anggota Parpol dan Ormas terhadap pancasila dan bela negara melalui pendidikan politik	Meningkatnya etika dan budaya politik	Pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat, parpol dan ormas	Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)		
					Persentase Partai Politik, Ormas Yang Melaksanakan Sosialisasi Bela Negara Dan Wawasan Kelangkaan (%)		
					Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang, Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			Meningkatnya ketertarikan organisasi kemasyarakatan		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
				Pelaksanaan pembinaan Organisasi kemasyarakatan dan LSM	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
		Meningkatnya ketahanan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan Masyarakat			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	(08)
			Lembaga kemasyarakatan yang memahami dan sadar Kerukunan berbasis Wawasan Kebangsaan	Pelaksanaan Pembinaan terhadap Ormas dan LSM berbasis kebudayaan	Persentase Konflik Sosial Yang Tertangani (%)		
					Jumlah Lembaga yang Terbina Sadar Kerukunan (Lembaga)	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
					Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya (Dokumen)	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
			Peningkatan kualitas layanan publik	Inovasi pada urusan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik.	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya (Dokumen)	2.22.08.5.07.0018 - Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	
					Persentase Capaian Implementasi Inovasi Layanan Publik (%)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	
					Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4.01.04.5.02 - Peningkatan Budaya Pemerintahan	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4.01.04.5.02.0001 - Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urutan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	8.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8.01.01.2.02.0001 - Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	8.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	8.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	
				Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	8.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan (Dokumen)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	8.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

6

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	(05)	Indeks Harmoni Indonesia II	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	(08)
						8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
						8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
						8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
						8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
						8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
						8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
						8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan		Persentase Konflik Sosial Yang Ditangani Dalam Wilayah (%)	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
				Pelaksanaan Fasilitasi Perumusan kebijakan teknis penanganan konflik Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

Program, kegiatan, dan pendanaan perangkat daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Selanjutnya program dijabarkan ke dalam rencana kegiatan berdasarkan strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah.

Dalam menyusun rencana pendanaan, Perangkat Daerah melakukan penghitungan kebutuhan anggaran secara rinci berdasarkan target kinerja yang ingin dicapai, memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Estimasi pendanaan disusun selama periode lima tahun, dengan tetap memperhitungkan dinamika fiskal dan prioritas tahunan yang tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Gunungkidul. Pendanaan Program dan Kegiatan Rencana program, kegiatan, dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurun waktu tahun 2025-2029 adalah sebagaimana tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		(03)		450.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000	(14)	(15)
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				450.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		
Lembaga kemasyarakatan yang memahami dan sadar Kerukunan berbasis Wawasan Kebangsaan	Jumlah Lembaga yang Terbina Sadar Kerukunan (Lembaga)	-	3	450.000.000	3	225.000.000	3	225.000.000	3	225.000.000	3	225.000.000	8.01.0.00.0.00. 01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				450.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		
Pelaksanaan Pembinaan terhadap Ormas dan LSM berbasis kebudayaan	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya (Dokumen)	3	1	450.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000		
2.22.08.5.07.0018 - Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				450.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		
Terlaksananya Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya (Dokumen)	3	1	450.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				0		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				0		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)				
Peningkatan kualitas layanan publik	Persentase Capaian Implementasi Inovasi Layanan Publik (%)	-	-	0	100	75.000.000	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	(14)	8.01.0.00.0.00. - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	(15)
4.01.04.5.02 - Peningkatan Budaya Pemerintahan				0			75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000			
Inovasi pada urusan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik.	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Dokumen)	0	0	0	1	75.000.000	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000			
4.01.04.5.02.0001 - Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota				0			75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000			
Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Dokumen)	0	0	0	1	75.000.000	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000			
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				6.677.877.325,24		6.952.338.083,31		7.029.801.460		7.230.471.673,9		7.260.856.015,73				
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				2.510.299.485,24		2.646.758.583,31		2.685.402.060		2.847.252.373,9		2.868.069.315,73				
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	80,2	80,3	2.510.299.485,24	80,35	2.646.758.583,31	80,4	2.685.402.060	80,45	2.847.252.373,9	80,5	2.868.069.315,73	80,5	2.868.069.315,73	8.01.0.00.0.00. - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				115.540.300		127.094.900		135.102.990		143.111.080		149.119.170				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(02) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	115.540.300	1	127.094.900	1	135.102.990	1	143.111.080	1	149.119.170	(14)	(15)	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17		17		17		17		17				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		5		5		5		5				
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		2		2		2		2				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
(01)	(02) Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	2	2		2		2		2			(14)	(15)
		1	1	1		1		1		1				
		1	1	1		1		1		1				
		2	2	2		2		2		2				
8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		43.718.000	45.694.500	
		1	36.150.000		39.765.000		41.741.500		43.718.000		45.694.500			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	1	1	1		1		1		1		43.718.000	45.694.500	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
(01)	(02) Daerah (Dokumen)	(03)											(14)	(15)
8.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				32.939.900			36.233.900		39.857.000		43.480.100		45.103.200	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	32.939.900	1		36.233.900	1	39.857.000	1	43.480.100	1	45.103.200	
8.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.879.800			2.067.900		2.274.690		2.481.480		2.688.270	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	2	1.879.800	2		2.067.900	2	2.274.690	2	2.481.480	2	2.688.270	
8.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.919.800			2.112.000		2.323.200		2.534.400		2.745.600	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	1.919.800	2		2.112.000	2	2.323.200	2	2.534.400	2	2.745.600	
8.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1.759.900			1.936.000		2.029.600		2.123.200		2.216.800	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	(02) Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	(03) 1	2	1.759.900	2	1.936.000	2	2.029.600	2	2.123.200	2	2.216.800	(14)	(15)
8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD				32.785.000		36.063.500		37.669.000		39.274.500		40.880.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17	32.785.000	17	36.063.500	17	37.669.000	17	39.274.500	17	40.880.000		
8.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				899.900		990.000		1.089.000		1.188.000		1.287.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	899.900	5	990.000	5	1.089.000	5	1.188.000	5	1.287.000		
8.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.206.000		7.926.600		8.119.000		8.311.400		8.503.800		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(02) Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	7.206.000	1	7.926.600	1	8.119.000	1	8.311.400	1	8.503.800	(14)	(15)	
8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.750.856.685,24		1.839.065.409,31		1.844.471.745		1.973.084.917,9		1.975.490.293,73			
Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1.750.856.685,24	1	1.839.065.409,31	1	1.844.471.745	1	1.973.084.917,9	1	1.975.490.293,73			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14		14				14		14				
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12		12				12		12				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)			
	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			1.710.417.785,24			1.796.342.709,31		1.800.470.745		1.927.805.617,9		1.928.932.693,73		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	1.710.417.785,24	14	14	1.796.342.709,31	14	1.800.470.745	14	1.927.805.617,9	14	1.928.932.693,73		
8.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.464.900			2.850.000		2.935.000		3.020.000		3.105.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	2.464.900	1	1	2.850.000	1	2.935.000	1	3.020.000	1	3.105.000		
8.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				37.974.000			39.872.700		41.066.000		42.259.300		43.452.600		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	37.974.000	12	12	39.872.700	12	41.066.000	12	42.259.300	12	43.452.600		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)			
	ulanan/Sema teran SKPD (Laporan)	(03)												(14)	(15)
8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				32.454.100			34.077.000		35.780.850		37.484.700		38.188.550		
Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7	8	32.454.100	8	34.077.000	8	35.780.850	8	37.484.700	8	38.188.550			
8.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				32.454.100			34.077.000		35.780.850		37.484.700		38.188.550		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7	8	32.454.100	8	34.077.000	8	35.780.850	8	37.484.700	8	38.188.550			
8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				351.177.000			368.736.500		378.673.300		388.610.100		392.308.950		
Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	20	351.177.000	20	368.736.500	20	378.673.300	20	388.610.100	20	392.308.950			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	350	360		350				350		350				
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1				1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)			
(01)	(02) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	12		12		12		12		12		(14)	(15)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	12	12		12		12		12		12			
	8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		9.119.000		9.575.000		9.853.750		10.132.500		10.411.250				
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	6	9.119.000	6	9.575.000	6	9.853.750	6	10.132.500	6	10.411.250		
	8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		73.744.000		77.432.000		79.303.600		81.175.200		82.046.800				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)				
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	73.744.000	12	77.432.000	12	79.303.600	12	81.175.200	12	82.046.800					
8.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5.000.000		5.250.000		5.312.500		5.375.000		5.437.500					
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000	12	5.250.000	12	5.312.500	12	5.375.000	12	5.437.500					
8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan			5.800.000		6.090.000		6.294.500		6.499.000		6.703.500					
Tersedianya Barang Cetak dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan (Paket)	12	5.800.000	12	6.090.000	12	6.294.500	12	6.499.000	12	6.703.500					
8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.200.000		1.260.000		1.323.000		1.386.000		1.449.000					
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan (Dokumen)	350	1.200.000	350	1.260.000	350	1.323.000	350	1.386.000	350	1.449.000					
8.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu			23.210.000		24.370.500		25.589.000		26.807.500		28.026.000					
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	23.210.000	1	24.370.500	1	25.589.000	1	26.807.500	1	28.026.000					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASELINE TAHUN 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH (14)	KET (15)		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)				
8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				233.104.000			244.759.000		250.996.950			257.234.900		258.234.900		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	20	233.104.000	20		244.759.000	20	250.996.950	20		257.234.900	20	258.234.900		
8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					37.845.000			39.739.000			41.725.950		43.712.900		45.699.850	
Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	6	37.845.000	2		39.739.000	2	41.725.950	2		43.712.900	2	45.699.850		
8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					37.845.000			39.739.000			41.725.950		43.712.900		45.699.850	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	6	37.845.000	2		39.739.000	2	41.725.950	2		43.712.900	2	45.699.850		
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					107.540.800			112.922.000			118.568.100		124.214.200		127.860.300	
Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	107.540.800	12		112.922.000	12	118.568.100	12		124.214.200	12	127.860.300		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12	6		6			6		6			6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASELINE TAHUN 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH (14)	KET (15)
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
	Disediakan (Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36			36				36			36	
8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				38.005.000			39.907.000			41.902.350			43.897.700	45.893.050
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	38.005.000	12	39.907.000	12	41.902.350	12	43.897.700	12		45.893.050	
8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				63.935.800			67.135.000			70.491.750			73.848.500	75.205.250
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	63.935.800	36	67.135.000	36	70.491.750	36	73.848.500	36		75.205.250	
8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.600.000			5.880.000			6.174.000			6.468.000	6.762.000
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	6	5.600.000	6	5.880.000	6	6.174.000	6	6.468.000	6		6.762.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASELINE TAHUN 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH (14)	KET (15)
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				114.885.600		125.123.774		131.079.125		137.034.476		139.402.202		
Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	20	20	114.885.600	20	125.123.774	20	131.079.125	20	137.034.476	20	139.402.202		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	46	154		154		154		154		154			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	22	22		22		22		22		22			
8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				68.000.000		71.400.000		74.970.000		78.540.000		79.550.000		

8

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH (14)	KET (15)
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	46 (03)	154 (04)	68.000.000 (05)	154 (06)	71.400.000 (07)	154 (08)	74.970.000 (09)	154 (10)	78.540.000 (11)	154 (12)	79.550.000 (13)		
8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.350.000		15.067.500		15.820.875		16.574.250		17.300.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	22	22	14.350.000	22	15.067.500	22	15.820.875	22	16.574.250	22	17.300.000		
8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				26.535.600		27.865.000		29.258.250		30.651.500		31.044.750		
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	1	1	26.535.600	1	27.865.000	1	29.258.250	1	30.651.500	1	31.044.750		
8.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		10.791.274		11.030.000		11.268.726		11.507.452		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	20	20	6.000.000	20	10.791.274	20	11.030.000	20	11.268.726	20	11.507.452		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASELINE TAHUN 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH (14)	KET (15)
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	6,87	6,7	1.256.471.000	6,71	1.254.412.500	6,72	1.259.256.000	6,73	1.264.099.500	1.259.256.000	1.264.099.500	1.265.356.500	
8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				1.256.471.000		1.254.412.500		1.259.256.000		1.264.099.500		1.265.356.500		8.01.0.00.0.00. 01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	100	370	1.256.471.000	150	1.254.412.500	200	1.259.256.000	250	1.264.099.500	300	1.265.356.500		
	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibraka n dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibra ka (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				141.471.000		148.545.000		149.802.000		151.059.000		151.316.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET				
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)						
8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		(03)		1.771.536.140			1.854.616.000			1.869.282.000			1.883.948.000		1.885.948.000	(14)	(15)	
Pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat, parpol dan ormas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemili han Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	100	850	1.771.536.140	250		1.854.616.000	300	1.869.282.000	350	1.883.948.000	350		1.885.948.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)				
(01)	(02)	(03)	20		20		20		20		20		20		(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Permili- han Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	20														
8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			274.957.400		283.208.000		284.204.000		285.200.000		286.200.000					



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
(01) Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	(02) Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemili han Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	(03) 100	850	274.957.400	250	283.208.000	300	284.204.000	350	285.200.000	350	286.200.000	(14)	(15)
8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1.496.578.740		1.571.408.000		1.585.078.000		1.598.748.000		1.599.748.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)			
(01) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	(02) Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemili han Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	(03) 20	20	1.496.578.740	20	1.571.408.000	20	1.585.078.000	20	1.598.748.000	20	1.599.748.000	(14)	(15)	
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				270.425.700			283.947.000		292.100.000		300.253.000		303.406.000		
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakata an yang Aktif (Persentase)	70	70,01	270.425.700	70,02	283.947.000	70,03	292.100.000	70,04	300.253.000	70,05	303.406.000	8.01.000.000, 01.00000 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				270.425.700		283.947.000		292.100.000		300.253.000		303.406.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										- PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
Pelaksanaan pembinaan Organisasi kemasyarakatan dan LSM	(02) Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendafaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	(03) 100	450	270.425.700	200	283.947.000	250	292.100.000	300	300.253.000	350	303.406.000	(14)	(15)
8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendafaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	(Orang)			270.425.700		283.947.000		292.100.000		300.253.000		303.406.000		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendafaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendafaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100	450	270.425.700	200	283.947.000	250	292.100.000	300	300.253.000	350	303.406.000		
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	(Orang)			373.135.300		391.793.000		400.382.000		408.971.000		409.560.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
(01) Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	(02) Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan n Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	100 (03)	373.135.300 (05)	100 (06)	391.793.000 (07)	100 (08)	400.382.000 (09)	100 (10)	408.971.000 (11)	100 (12)	409.560.000 (13)	(14) 8.01.0.00.0.00. 01.00000 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	(15)	
8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			373.135.300		391.793.000		400.382.000		408.971.000		409.560.000			
Pelaksanaan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	100	373.135.300	200	391.793.000	250	400.382.000	300	408.971.000	300	409.560.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	(02)	(03)		373.135.300	(06)	391.793.000	(08)	400.382.000	(10)	408.971.000	(12)	409.560.000	(14)	(15)
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	100	490	373.135.300	200	391.793.000	250	400.382.000	300	408.971.000	300	409.560.000		
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				496.009.700		520.811.000		523.379.400		525.947.800		528.516.200		
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial Yang Ditangani Dalam Wilayah (%)	92	94	496.009.700	95	520.811.000	96	523.379.400	97	525.947.800	98	528.516.200	8.01.0.00.0.00. 01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASELINE TAHUN 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH (14)	KET (15)
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				496.009.700		520.811.000		523.379.400		525.947.800		528.516.200		
Pelaksanaan Fasilitasi Perumusan kebijakan teknis penanganan konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dim. Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kebudayaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	100	1.080	496.009.700	200	520.811.000	250	523.379.400	300	525.947.800	300	528.516.200		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dim. Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,	14	14		14		14		14		14			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASELINE TAHUN 2024 (03)		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						PERANGKAT DAERAH (14)	KET (15)				
		TARGET (04)	PAGU (05)	2026		2027		2028				2029		2030	
				TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)			TARGET (12)	PAGU (13)		
	Fasilitasi Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)														
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	2	2			2				2			2		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Ko ta (Dokumen)	6	6			6				6			6		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						PERANGKAT DAERAH		KET			
			2026		2027		2028		2029			2030		
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)			TARGET (12)	PAGU (13)
(01)	(02) Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	(03) 100	(04) 140	(05) 	(06) 200	(07) 	(08) 250	(09) 	(10) 300	(11) 	(12) 300	(13) 	(14) 	(15)
8.01.06.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				2.245.000		2.358.000		2.475.900		2.593.800		2.711.700		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
(01) Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	(02) Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	(03) 2	2	2.245.000	2	2.358.000	2	2.475.900	2	2.593.800	2	2.711.700	(14)	(15)
8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				43.510.000		45.685.500		46.969.000		48.252.500		49.522.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
(01)	(02)	(03)											(14)	(15)
Terlaksananya Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100	140	43.510.000	200	45.685.500	250	46.969.000	300	48.252.500	300	49.522.000		
8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Konflik di Daerah (Orang)			209.050.000		219.502.500		220.477.000		221.451.500		222.426.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
(01) Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	(02) Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	(03) 100	1.080	209.050.000	200	219.502.500	250	220.477.000	300	221.451.500	300	222.426.000	(14)	(15)
8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				39.589.900		41.570.000		41.748.500		41.927.000		42.105.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
(01) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	(02) Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	(03) 14	14	39.589.900	14	41.570.000	14	41.748.500	14	41.927.000	14	42.105.500	(14)	(15)
8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				201.614.800		211.695.000		211.709.000		211.723.000		211.751.000		
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Ko ta (Dokumen)	6	6	201.614.800	6	211.695.000	6	211.709.000	6	211.723.000	6	211.751.000		

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun dan melaksanakan subkegiatan yang selaras dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD. Subkegiatan merupakan unit terkecil dari program dan kegiatan, yang secara spesifik dirancang untuk menghasilkan outcome yang terukur dan mendukung capaian indikator kinerja pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas dalam mendukung prioritas pembangunan daerah tersaji dalam tabel berikut;

Tabel 4.3
Subkegiatan prioritas dalam mendukung
prioritas pembangunan daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				
1.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Lembaga kemasyarakatan yang memahami dan sadar Kerukunan berbasis Wawasan Kebangsaan	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 2.22.08.5.07.0018 - Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	
2.	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Peningkatan kualitas layanan public Persentase Capaian Implementasi Inovasi Layanan Publik	4.01.04.5.02 - Peningkatan Budaya Pemerintahan Inovasi layanan publik	
3.	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 8.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 8.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			8.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			8.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			8.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			8.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			8.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
			8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			8.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
4.	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
5.	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya etika dan budaya politik	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
			8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
6.	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
7.	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
			8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
8.	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			8.01.06.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 dapat kami uraikan, sebagai berikut :

1. Persentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan
2. Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)
3. Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)
4. Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten (akumulasi capaian kegiatan)

Untuk kondisi awal, target tahunan, dan kondisi akhir indikator kinerja tersebut di atas dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, akan kami uraikan dalam tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	6,69	6,70	6,71	6,72	6,73	6,74	
2	Persentase Partai Politik, Ormas Yang Melaksanakan Sosialisasi Bela Negara Dan Wawasan Kebangsaan	Persen	70,00	70,01	70,02	70,03	70,04	70,05	
3	Persentase Konflik Sosial Yang Tertangani	Persen	93%	94%	95%	96%	97%	98%	

METADATA INDIKATOR KINERJA DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	TARGET						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01) 2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN KEZDARYAAN	(02)					(04)	(05)	(07)	(09)	(11)	(13)	(15)
Jumlah Lembaga yang menabahi dan sadar kerukunan berkeadilan masyarakat	Jumlah Lembaga yang Terbiasa Sadar Kerukunan (Lembaga)	Pemilihan terhadap lembaga agar bisa memahami dan menyadari tentang pentingnya kerukunan berkeadilan masyarakat	Jumlah lembaga yang mengikuti pemilihan sadar kerukunan berkeadilan masyarakat	semakin banyak jumlah lembaga yang terbiasa maka diharapkan tingkat kesadaran dan kerukunan berkeadilan masyarakat		-	3	3	3	3	3	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN												
Peningkatan Kualitas layanan publik	Persentase Capaian Implementasi Inovasi Layanan Publik (%)	SIKAP (Berwujud, Informatif, Cepat, Akuntabel, Profesional) merupakan pedoman perilaku yang menjadi fondasi pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan. Budaya kerja ini diadopsi untuk memastikan setiap staf memberikan layanan berkualitas, berintegritas, dan berfokus pada kepuasan masyarakat. Melalui implementasi nilai-nilai SIKAP, Dinas Pendidikan berkomitmen untuk menjadi institusi pelayanan publik yang dapat diandalkan dan dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan di sekitar pendidikan.	Jumlah nilai indikator dibagi 5 (lima) dibagi 100 (seratus) persen	Skor 85-100% Layanan Prima, menunjukkan standar layanan sangat baik dengan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi. Layanan telah memenuhi atau melampaui ekspektasi pengguna dalam semua aspek SIKAP. Skor 70-84% Layanan Prima menunjukkan standar layanan baik dengan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi. Layanan telah memenuhi atau melampaui ekspektasi pengguna dalam semua aspek SIKAP. Skor 1-3 menunjukkan SIKAP yang perlu perbaikan khusus. Skor <70% Perlu Perbaikan Signifikan, menunjukkan adanya masalah serius dalam kualitas layanan yang memerlukan intervensi menyeluruh dan segera. Program perbaikan dan pelatihan intensif diperlukan.		-	-	100	100	100	100	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PD	Rerata Capaian Indikator kinerja kegiatan x 100%	Semakin tinggi nilai AKIP, semakin baik akuntabilitas kinerja, yang mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran, sistem manajemen kinerja yang terdapat, dan komitmen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	80.25	80.30	80.35	80.40	80.45	80.50	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE 2024	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							2025	2026	2027	2028	2029		2030
8.01.02 - PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	Indeks Harmoni Indonesia (IHI)	Indeks Harmoni Indonesia (IHI) merupakan nilai pengukuran yang dirancang untuk menilai tingkat harmoni sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya pada tingkat kabupaten/kota	Sumus HHI Meret Measurement (Hate + I.X) + (2 X2 dan seterusnya) dik X8. IHI akan hasil X1 nya. IHI akan bobotnya	Pengukuran masih dilaksanakan secara terpusat oleh dijen Polpum Kemendagri	Dirjen Polpum Kemendagri	6.87	6.69	6.70	6.71	6.72	6.73	6.73	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kestatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Meningkatnya etika dan budaya politik													
8.01.04 - PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Meningkatnya keterlibatan organisasi kemasyarakatan	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Presentase)	Jumlah kader partai politik yang pendidikan politik pada tahun anggaran berjalan	Jumlah kader yang mengikuti pendidikan X 100	Pengukuran jumlah kader Partai politik yg telah mendapatkan pendidikan politik	Badan Kestatuan Bangsa Dan Politik	-	100	100	100	100	100	100	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kestatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PENGEMBIANGAN KETAHANAN EKONOME, SOSIAL, DAN BUDAYA Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Presentase)	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapatkan rekomendasi dari Kementkumham dan telah mendirikan di Badan Kestatuan Bangsa dan Politik	$\frac{\sum \text{Ormas yang melapor}}{\sum \text{Ormas yang terdaftar}} \times 100\%$	Pengukuran jumlah ormas yg mendapat rekomendasi dan telah mendirikan di Badan Kestatuan Bangsa dan Politik	Badan Kestatuan Bangsa dan Politik	70.00	70.00	70.01	70.02	70.03	70.04	70.05	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kestatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PENGEMBIANGAN KETAHANAN EKONOME, SOSIAL, DAN BUDAYA Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penanggulangan Bencana, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	Jumlah permasalahan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penanggulangan Bencana, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	$\frac{\sum \text{Jumlah kebijakan yang terrealisasi}}{\sum \text{Jumlah rumusan kebijakan}} \times 100\%$	Kondisi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Bencana, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Badan Kestatuan Bangsa dan Politik	100	100	100	100	100	100	100	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kestatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial Yang Diungkap Dalam Wilayah (%)	Jumlah konflik sosial masyarakat yang dapat diselesaikan pada tahun berjalan	$\frac{\sum \text{konflik sosial yang tertangani}}{\sum \text{konflik sosial yang terjadi}} \times 100\%$	Penanganan penanganan konflik sosial masyarakat pada wilayah Kabupaten gusungkilal	Badan Kestatuan Bangsa dan Politik	92	93	94	95	96	97	98	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kestatuan Bangsa Dan Politik

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman dan arah bagi aparatur di jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 ini ditentukan oleh kerja sama, kemitraan, dan peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Gunungkidul.

Pada akhirnya kami berharap agar tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dapat tercapai.


KEPALA,
JOHANDEKO SUDARTO


BUPATI GUNUNGKIDUL
ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH